KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1390-5757-7377-0418

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693036/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(15)	KALIMANTAN SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(693036)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Sebesar	:	Rp. 508.000.000	(LIMA RATUS DELAPAN JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	508.000.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	508.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	508.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANJARMASIN	(045)	Rp.	508.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1390-5757-7377-0418

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				508.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				508.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan				
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		25,00	Rekomendasi Kebijakan	398.056.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah		25.00	Rekomendasi Kebijakan	398.056.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		15,00	Orang	65.646.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		15.00	Orang	65.646.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	44.298.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	44.298.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025

DS:1390-5757-7377-0418

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	508.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	508.000.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025

DS:1390-5757-7377-0418

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693036	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**	**-**	**508.000**	**-**	**-**	**-**	**508.000**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**508.000**	**-**	**-**	**-**	**508.000**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**508.000**	**-**	**-**	**-**	**508.000**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	398.056	-	-	-	398.056	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	398.056	-	-	-	398.056	045@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	-	65.646	-	-	-	65.646	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	65.646	-	-	-	65.646	045@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	44.298	-	-	-	44.298	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	44.298	-	-	-	44.298	045@	
	JUMLAH	**-**	**508.000**	**-**	**-**	**-**	**508.000**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1390-5757-7377-0418

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (693036) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693036**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.612	508.000
		BELANJA BARANG	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.612	508.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.612	508.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.612	508.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025
IV A. B L O K I R

DS:1390-5757-7377-0418

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693036] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693036	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	158.691
	52 Belanja Barang	Rp.	158.691
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**		
7129.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	92.421
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.535
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	**Standarisasi Profesi dan SDM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.585
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	16.175
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	19.075
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693036/2025
IV B. C A T A T A N

DS:1390-5757-7377-0418

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693036] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001